BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang sangat subur dengan potensi alam yang sangat berlimpah dan memiliki keanekaragaman adat istiadat serta budaya yang berbeda-beda, menjadikan Indonesia sebagai negara yang memiliki potensi besar untuk menghasilkan produk-produk hasil budi dayanya dengan ciri khas daerahnya masing-masing. Dengan kekayaan sumber daya alam baik yang terkandung di dalam tanah, air, dan udara tersebut merupakan suatu anugerah yang patut disyukuri oleh bangsa Indonesia sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Anugerah tersebut tentu perlu diolah sehingga menimbulkan manfaat untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia.

Seperti yang telah diamanatkan dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Namun, kenyataannya dengan sumber daya alam yang begitu melimpah tidak sejalan dengan kemakmuran bangsa Indonesia sendiri, padahal ini merupakan suatu peluang bagi negara Indonesia untuk dapat ikut andil dalam sistem perdagangan baik nasional maupun internasional.

Namun, Indonesia saat ini belum menyadari betapa pentingnya melindungi sumber daya alamnya terlihat dari sumirnya Undang-Undang yang melindungi sumber daya alam yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya yang mana sudah

banyaknya kasus sumber daya hayati yang tidak dapat diproses secara optimal.¹ Sehingga banyak pihak ketiga dari dalam dan luar negeri yang memanfaatkan sumber daya alam Indonesia untuk keuntungannya dengan mengabaikan kepentingan masyarakat yang memproduksi barang dan/atau produk dari sumber daya alam di wilayah tersebut terlebih lagi bahwa sektor ekonomi strategis di Indonesia dikuasai oleh pihak-pihak asing.²

Kekayaan Intelektual (KI) merupakan sesuatu yang dihasilkan dari daya pikir seseorang, diekspresikan lalu dituangkan menjadi produk berupa teknologi, ilmu pengetahuan, sastra dan seni budaya yang mana semuanya itu terlahir dengan perjuangan. Indonesia menyimpan begitu banyak kekayaan alam dengan keunikannya masing-masing yang bercirikan daerah asalnya. Maka tak heran terdapat begitu banyak produk-produk Indikasi Geografis dari setiap daerahnya.

Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan.

¹Lutfy Mairizal Putra, “Perubahan Undang-Undang Konservasi SDA Semakin Diperlukan” Kompas, Artikel, 19 September 2017. Diakses dari <https://sains.kompas.com/read/2017/09/19/160500723/perubahan-undang-undangkonservasi-sda-semakin-diperlukan> tanggal 19 september 2020

²Suadi, “Aset Ekonomi Indonesia Dikuasai Asing,” Medan Bisnis Daily, Opini, 15 Februari 2016. Diakses dari <https://www.medanbisnisdaily.com/news/read/2016/02/15/216192/aset-ekonomi-indonesia-dikuasai-asing/> tanggal 21 september 2020

Dilihat dari sejarah hukum, awal mula pengaturan Indikasi Geografis dimana *World Trade Organization (WTO)* sebagai organisasi perdagangan internasional telah mengatur indikasi geografis tersebut di dalam *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs)*, yang diatur pada pasal 22 ayat (1) yaitu :

*“Geographical indications are, for the purposes of this agreement, indications which identify a good as originating in the territory of a member, or a region or locality in that territory, where a given quality, reputation or other characteristic of the good is essentially attributable to its geographical origin.”*³

“Indikasi geografis adalah untuk kepentingan dari perjanjian ini, indikasi yang mengidentifikasi daerah asal suatu barang dari suatu tempat atau wilayah atau teritori, yang dimana memberikan kualitas, reputasi dan karakteristik suatu barang yang ciri khasnya dapat dihubungkan dalam asal tempat geografis.”

Indonesia sebagai salah satu anggota WTO telah memasukan ketentuan indikasi geografis yang tertuang pada pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek lalu selanjutnya terbit peraturan pelaksanaannya yaitu pada Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis dan sampai dengan peraturan terbaru pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Selain itu, Indikasi Geografis juga memiliki pengaturan khusus oleh Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual dan juga diakui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang dituangkan dan diterbitkan pada Buku Indikasi Geografis

Indonesia. Indonesia memiliki banyak sekali potensi Indikasi Geografis yang perlu segera didaftarkan ke kantor Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Indonesia.⁴

Namun persoalan yang saat ini terjadi, dari sekian banyak potensi Indikasi Geografis yang dimiliki oleh Indonesia hanya sedikit sekali Indikasi Geografis yang terdaftar. Sebagaimana terdapat di dalam laman Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Kemenkumham, baru ada 92 Indikasi Geografis yang terdaftar dari ribuan potensi Indikasi Geografis yang dimiliki oleh Indonesia. Disini dapat terlihat bahwa masih minimnya kesadaran masyarakat Indonesia untuk mendaftarkan potensi-potensi Indikasi Geografis yang dimiliki.

Hal tersebut dibuktikan dengan adanya contoh dua kasus dimana Indonesia mengalami kecolongan yakni mengenai pelanggaran Indikasi Geografis pada merek Kopi Toraja dan Kopi Gayo. Dimana pendaftaran merek kopi dengan nama Toraja telah didaftarkan oleh Key Coffe Co. dimulai pada saat pemilik merek “Toarco Toraja” tersebut mengajukan permohonan perlindungan atas merek kopi yang mulai populer di Jepang. Ancaman adanya pesaing yang menggunakan merek dagang dengan nama yang sama menjadi dasar permohonan perlindungan mereknya pada 1974 dan kemudian pendafatarannya dikabulkan pada 1976.

Sedangkan kasus kedua yaitu kasus Kopi Gayo dimana merek dagang tersebut di klaim milik perusahaan perdagangan asal Belanda sebagai

⁴Abdul Atzar, *Mengenal Lebih Dekat Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Deepublish, Yogyakarta, 2018, hal.74.

pemegang hak yang notabene Kopi Gayo tersebut adalah khas dari Nangroe Aceh Darussalam, perusahaan asal Belanda tersebut (*Holland Coffe B.V*) mengklaim bahwa perusahaan tersebut merupakan pemilik dari hak merek dagang kopi tersebut dan terdaftar di dunia internasional dengan nama *Gayo Mountain Coffee*.

Hal tersebut tentu merugikan masyarakat Indonesia terutama masyarakat Toraja dan Nangroe Aceh Darussalam, pasalnya hasil produk kopi yang diproduksi di Indonesia dikomersilkan oleh negara lain yang tidak berhak untuk diakui sebagai miliknya dan melakukan komersialisasi untuk mendapatkan keuntungan ekonomi. Hal inilah yang menjadi alasan pentingnya mengapa Indikasi Geografis perlu mendapatkan perlindungan hukum, tidak hanya bernilai ekonomis tetapi juga bernilai budaya, kebanggaan daerah dan negara.

Alasan lainnya yaitu : *pertama*, Indikasi Geografis merupakan tanda pengenal atas barang yang berasal dari wilayah tertentu atau nama dari barang yang dihasilkan dari suatu wilayah tertentu dan secara tegas tidak bisa dipergunakan untuk produk sejenis yang dihasilkan dari wilayah lain; *kedua*, Indikasi Geografis merupakan indikator kualitas, indikasi geografis menginformasikan kepada konsumen bahwa barang tersebut dihasilkan dari suatu lokasi tertentu yang terus dipertahankan reputasinya ; *ketiga*, Indikasi Geografis merupakan strategi bisnis dimana Indikasi Geografis memberikan nilai tambah komersil terhadap produk karena keoriginalitasnya dan limitasi produk yang tidak bisa diproduksi didaerah lain ; *keempat*, berdasarkan

perjanjian TRIPs Indikasi Geografis ditetapkan sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual yang hak kepemilikannya dapat dipertahankan dari segala tindakan melawan hukum dan persaingan curang.⁵

Selain itu, Menurut Lili Karuna Dewi yang tercantum dalam jurnal ilmiahnya tentang Perlindungan Produk-Produk Berpotensi Hak Kekayaan Intelektual melalui Indikasi Geografis, suatu produk Indikasi Geografis harus didaftarkan sesuai dengan kriteria yang ada dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis agar mendapatkan perlindungan. Dalam pasal 56 ayat (1) disebutkan bahwa permohonan indikasi geografis tidak dapat didaftarkan jika :

- a. bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum;
- b. menyesatkan atau memperdaya masyarakat mengenai reputasi, kualitas, karakteristik, asal sumber, proses pembuatan barang, dan/atau kegunaannya; dan
- c. merupakan nama yang telah digunakan sebagai varietas tanaman yang sejenis, kecuali ada penambahan padanan kata yang menunjukkan faktor indikasi geografis yang sejenis.

Namun, dalam pasal 56 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyebutkan bahwa “menyesatkan atau memperdaya masyarakat mengenai reputasi, kualitas,

⁵Candra Irawan, “Pendaftaran Indikasi Geografis sebagai Instrumen Perlindungan Hukum dan Peningkatan Daya Saing Produk Daerah di Indonesia,” *Jurnal Unisbank* Vol. 3 No. 3, 2017, hal.2. Diakses dari <https://www.unisbank.ac.id/ojs/index.php/sendiu/article/download/5065/1575> Tanggal 5 januari 2020

karakteristik, asal sumber, proses pembuatan barang, dan/atau kegunaanya.” Namun tidak dijelaskan lebih lanjut mengenai apa yang menjadi kualifikasi sehingga dapat dikategorikan sebagai “menyesatkan masyarakat” tersebut. Dalam penjelasan pasal pun tidak dijelaskan dan hanya menyebutkan bahwa ketentuan pada pasal tersebut cukup jelas, sehingga hal tersebut membuat pasal ini akan menimbulkan kekeliruan karena memiliki lebih dari satu makna (multitafsir) sehingga nantinya akan menimbulkan ketidakpastian hukum.⁶ Berdasarkan beberapa persoalan diatas menjadi pijakan awal bagi penulis untuk melakukan penelitian mengenai “**Analisis Yuridis Pendaftaran Indikasi Geografis Berdasarkan Prinsip Kepastian Hukum**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka identifikasi masalah yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan prinsip kepastian hukum dalam pengaturan pendaftaran indikasi geografis?
2. Bagaimana mekanisme pendaftaran indikasi geografis sesuai dengan peraturan perundang undangan?

⁶Lili Karuna Dewi, “Perlindungan Produk-Produk Berpotensi Hak Kekayaan Intelektual melalui Indikasi Geografis”, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol 7 No.3, 2019, hal.4. Diakses dari <https://ocs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/download/47568/28509/> tanggal 7 januari 2020

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

penulisan skripsi ini adalah :

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana Penerapan indikasi geografis dalam perspektif kepastian Hukum
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana mekanisme pendaftaran indikasi geografis.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu :

- a. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat menjadi sumbangsih pemikiran serta bagi pengembangan Ilmu Hukum, Khususnya Khazanah berpikir Hukum Ekonomi;
- b. Secara Praktis, penelitian dan penyusunan skripsi ini sebagai upaya pemenuhan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jambi

D. Kerangka Konseptual

Adapun Kerangka konseptual dari penelitian ini dimaksudkan untuk dapat lebih mudah memahami maksud penulis, maka perlu kiranya penulis memberikan definisi atau batasan dari konsep tersebut sebagai pengantar awal yakni sebagai berikut :

1. Analisis Yuridis

Analisis Yuridis berasal dari dua kata pokok, analisis memiliki pengertian sebagai cara mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami),

pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya). Sedangkan Yuridis menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata “*yuridisch*” yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum. Dapat disimpulkan tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.⁷ Berdasarkan Pengertian diatas dapat dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan analisis adalah serangkaian penguraian suatu pokok permasalahan terhadap unsur-unsur yang ada didalamnya untuk memperoleh pengertian serta maksud dan tujuan yang tepat.

2. Pendaftaran

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendaftaran adalah pencatatan nama, alamat dan sebagainya dalam sebuah daftar. Pendaftaran adalah proses pencatatan identitas pendaftar kedalam sebuah media penyimpanan yang digunakan dalam proses pendaftaran.

3. Indikasi geografis

Menurut Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yakni dalam Pasal 1 Angka 6 bahwa Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kornbinasi dari kedua faktor tersebut memberikan

⁷ Anonim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, PT. Balai Pustaka, Jakarta, 2003, hal.6.

reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan.

4. Merek

Menurut Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yakni dalam Pasal 1 Angka 1 bahwa *Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.*

E. Landasan Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

Terkait dengan teori perlindungan hukum, ada beberapa ahli yang menjelaskan bahasan ini, antara lain yaitu Fitzgerald, Satjipto Raharjo, dan Phillipus M Hanjon. Fitzgerald mengutip istilah teori perlindungan hukum dari Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalulintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan

hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.⁸

Menurut Satjipto Rahardjo, “Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.”⁹

Selanjutnya menurut Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan resprensif. Perlindungan Hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang resprensif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.¹⁰

2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto mendefenisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu :

- 1) Tersedia aturan -aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara.

⁸ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hal.53.

⁹ *Ibid* hal. 69.

¹⁰ *Op.Cit* hal.54

- 2) Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
- 3) Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturanaturan tersebut.
- 4) Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.
- 5) Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.”¹¹

Sudikno Mertokusumo juga menjabarkan, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.¹²

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Metode penelitian dalam penyusunan proposal skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa Peraturan Perundang-Undangan, dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian dan referensi lainnya. Metode yuridis normatif dapat dilengkapi dengan diskusi, dan rapat dengan pendapat.

¹¹Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Sinar Grafika, Jakarta., 2011, hal. 14.

¹²Asikin Zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta. 2012, hal.17.

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan dalam penyusunan proposal skripsi ini menggunakan pendekatan :

- a. Pendekatan kasus (*case approach*), “yaitu pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dijadikan topic pembahasan dalam sebuah penulisan.”¹³
- b. Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), yaitu mengkaji permasalahan dari segi hukum yang terdapat dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia yang terkait dengan permasalahan yang dikaji.
- c. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan berangkat dari pemahaman terhadap teori, asas, doktrin yang ada. Maka, dapat membimbing peneliti untuk dapat mengaitkan antara praktik yang ada dengan teori yang relevan, sehingga selanjutnya peneliti dapat menganalisis dalam rangka mencari alternative solusi terbaik untuk memecahkan hukum yang dikaji.

3. Pengumpulan Bahan Hukum

1. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

¹³Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2005, hal 134.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah studi kepustakaan (*library research*), yaitu melakukan inventarisasi bahan hukum dan informasi berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah :

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Bahan hukum primer mempunyai kekuatan mengikat. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :
 - 1) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dan Indikasi Geografis;
 - 2) Peraturan pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis;
 - 3) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;
 - 4) *TRIPs Agreement*.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam penyusunan skripsi ini terdiri dari buku, jurnal, artikel, dan literature lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu ensiklopedia dan kamus.

2. Analisis Bahan Hukum

Analisis dilakukan dengan cara :

- a. Inventarisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan;
- b. Mengidentifikasi isu hukum yang hendak dibahas;
- c. Interpretasi peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan permasalahan yang dibahas.

F. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian ini akan penulis susun dalam sebuah skripsi menggunakan sistematika sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Bab ini adalah bab pertama yang berisikan latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Umum

Bab ini berisikan tinjauan teori yang dipakai penulis untuk menjelaskan mengenai definisi dan teori-teori yang berhubungan dengan masalah yang diangkat oleh penulis, yang juga akan dijadikan pedoman pemecahan permasalahan.

BAB III Pembahasan

Bab ini merupakan bab paling penting yang berisikan pembahasan terhadap rumusan permasalahan, yaitu bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap indikasi geografis yang telah didaftarkan sebagai merk berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan mengapa perlu dilakukan perlindungan hukum terhadap indikasi geografis yang telah didaftarkan sebagai merk berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

BAB IV Penutup

Bab ini adalah bab terakhir yang berisikan tentang kesimpulan dan saran dari keseluruhan bab yang telah dibuat.